

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kondisi perekonomian di Indonesia menjadi tema sentral dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini secara keseluruhan memiliki dampak yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dan terbentuknya otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 1999 di setiap daerah menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako serta pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil mengharuskan pemerintah untuk bekerja keras dalam menstabilkan kondisi ini. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter yang mengacu pada kebijakan otoritas moneter memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Otoritas moneter yang dipegang oleh Bank Sentral berfungsi mengatur jumlah dan alokasi uang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga untuk mencapai sasaran ekonomi makro. Sasaran pokok dalam kebijakan moneter Bank Indonesia ini terfokus pada tujuan mencapai dan memelihara stabilitas rupiah. Dimensi internal dari memelihara kestabilan nilai rupiah di antaranya adalah dengan mengendalikan laju inflasi dalam negeri, yang pada

akhirnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (*Soebagyo & Asmanto P.,2007: 56*).

Bank Sentral menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian sasaran – sasaran moneter. Empat instrumen yang dilakukan Bank Sentral dalam kebijakan moneter adalah adanya cadangan wajib (*Reserve Requirement*), Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*), Fasilitas Diskonto (*Discount Policy*), dan Imbauan (*Moral Suation*). Keempat instrumen tersebut digunakan untuk mencapai indikator moneter yakni suku bunga dan uang beredar, di mana indikator tersebut digunakan untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan. Target akhir dari kebijakan moneter tersebut adalah stabilitas harga, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan neraca pembayaran (*Pohan, 2008: 29-34*). Dengan adanya kebijakan moneter melalui instrumen tersebut, diharapkan dapat tercapai suatu kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam mengendalikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter menjadi salah satu bagian penting dari kebijakan ekonomi makro, namun kebijakan moneter tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam memanipulasi pendapatan negara atau anggaran negara. Perubahan kebijakan pemerintah ini jika dilihat dari sisi fiskal dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan tingkat konsumsi pemerintah. Kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (*Samuelson, 2001:85*).

Menurut Burhanudin Abdullah (2003), dalam mencapai dan memelihara

kestabilan ekonomi makro, kebijakan fiskal/anggaran berimbang diterapkan untuk menghindari penggunaan utang domestik dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter tetap menjaga agar pertumbuhan likuiditas sesuai dengan pertumbuhan permintaan riil. Selain itu, nilai tukar rupiah selalu berada pada posisi yang realistis yang dilakukan melalui kebijakan devaluasi. Berbagai langkah kebijakan tersebut telah mendukung pemeliharaan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dan dapat diprediksi selama periode sebelum krisis ekonomi, sehingga suku bunga riil dapat dipertahankan pada tingkat yang selalu positif serta mampu mendorong kenaikan tabungan dan investasi.

Permasalahan krisis ekonomi dan otonomi daerah berkaitan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional. Ukuran potensi variabel dari kebijakan fiskal adalah melalui pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD). Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Tujuan adanya pengeluaran pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah, sedangkan pengeluaran rutin daerah ditujukan untuk pembelanjaan yang bersifat rutin dan berkelanjutan, sementara itu pendapatan asli daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah di tiap-tiap daerah.

Kondisi di tiap-tiap daerah memiliki keberagaman dalam menentukan kebijakan. Menurut Simorangkir (2005), kondisi yang beragam di tiap-tiap daerah membuat pemegang kebijakan moneter (Bank Indonesia) memiliki target dalam

menstabilkan harga, tetapi di sisi lain tidak jarang kebijakan fiskal justru memberikan ruang gerak pada ketidakstabilan harga yang dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokrasi yang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang cepat, terciptanya stabilitas keamanan yang lebih baik, serta adanya hubungan yang selaras antar daerah. Hal ini dibuktikan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otoritas untuk mengelola kegiatan ekonomi daerahnya. Provinsi DIY mempunyai beberapa masalah pokok dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Salah satunya yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) tahun 2001 sampai 2005 meliputi kawasan tertinggal dan kemiskinan, yang ditandai masih terdapatnya desa-desa tertinggal di kawasan pengembangan timur serta jumlah keluarga pra sejahtera yang masih sekitar 21,10% pada tahun 2000 (*Hafidh*, 2008: 4)

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan Daerah Tingkat II. Adanya otonomi daerah di DIY menyebabkan pemerintah daerah untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada, biasanya mengenai perlunya hak untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam hal ekonomi sehingga dapat meringankan

beban pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dicerminkan dengan kebijakan fiskal dalam mengatasi fluktuasi-fluktuasi perekonomian yang disebabkan adanya krisis ekonomi dan otonomi daerah.

Awalnya kinerja perekonomian di DIY dari tahun ke tahun cukup baik, namun setelah adanya krisis ekonomi dari sisi moneter dan otonomi daerah dari sisi fiskal secara perlahan kondisi perekonomian di DIY mengalami perubahan, terlebih lagi setelah terjadinya gempa bumi pada tahun 2006 lalu. Pada kenyataannya gempa bumi tidak begitu memiliki dampak besar terhadap perekonomian, karena dilihat dari kinerja perekonomian propinsi DIY selama tahun 2006 masih menunjukkan kenaikan meskipun tidak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya (*Badan Pusat Statistik, 2006: 44*).

Laju inflasi di Provinsi DIY yang dihitung berdasarkan PDRB deflator pada Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan bahwa laju inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996 sebesar 5,66% meningkat pada tahun 1997 sekitar 7,33% menjadi 54,45% pada tahun berikutnya yaitu tahun 1998 karena krisis ekonomi. Setelah tahun 1999 hingga tahun 2007, laju inflasi di Provinsi DIY mulai membaik setelah adanya krisis ekonomi meskipun tidak seperti yang diharapkan selama ini.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah. Tabel 1.1

menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996, 1997 dan 1998 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,79% menjadi sebesar -11.36% dan 2.96% sebagai akibat dari krisis ekonomi pada pertengahan 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Pasca krisis ekonomi dan mulai diberlakukan otonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi yang dari tahun ke tahun secara perlahan mulai meningkat.

Adapun besarnya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1 Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam %)**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>
1990	10.05	4.57
1991	10.09	5.19
1992	6.26	6.94
1993	9.93	6.40
1994	11.30	8.11
1995	6.47	8.09
1996	5.66	7.79
1997	7.33	3.53
1998	54.45	-11.36
1999	17.47	2.96
2000	7.03	4.01
2001	8.36	4.26
2002	10.11	4.50
2003	7.02	4.58
2004	6.82	5.12
2005	9.85	4.73
2006	11.96	3.70
2007	7.27	4.31

**Sumber : BPS, berbagai tahun, data diolah.**

Seiring dengan berjalannya waktu, indikator makro di DIY tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi relatif terkendali. Sejak periode tahun 1999-2007 mulai terjadi perbaikan kinerja perekonomian nasional sehingga membawa pengaruh yang baik pada perekonomian daerah terutama di DIY. Dalam ruang lingkup regional, tujuan pembangunan di setiap daerah adalah menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai indikator kebijakan moneter adalah suku bunga riil, dana pihak ketiga yang merupakan salah satu variabel jumlah uang beredar dari sisi penawaran, dan kredit dari sisi permintaan uang, sedangkan variabel yang digunakan sebagai indikator dari kebijakan fiskal adalah pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin daerah dan pengeluaran pembangunan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. **Bagaimana pengaruh variabel *shock* ekonomi (krisis ekonomi) dan perubahan kebijakan (otonomi daerah) terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui pengaruh variabel *shock* ekonomi dan perubahan kebijakan (otonomi daerah) terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Bagi Pemda

Para pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan terhadap dalam menerapkan kebijakan.



**b. Bagi Peneliti dan Pembaca**

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**1.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diambil dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

**1. Model Inflasi:**

- a. Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dana pihak ketiga, kredit, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pertumbuhan pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Pertumbuhan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- f. **Pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- g. **Suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- h. **Krisis ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- i. **Otonomi daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

2. **Model Pertumbuhan Ekonomi:**

- a. **Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dana pihak ketiga, kredit, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- b. **Pertumbuhan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- c. **Pertumbuhan pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- d. **Pertumbuhan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

- e. Pertumbuhan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Krisis ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- i. Otonomi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sumber Data**

Objek penelitian ini, meliputi : 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimulai dari tahun 1990 sampai tahun 2007. Data ini merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section* atau *Panel Pooled Data*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Provinsi DIY dalam angka dan Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pusat Statistik), Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA) terbitan Bank

Indonesia berbagai edisi serta data-data yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.6.2 Model dan Metode Analisis Data

Model penelitian ini menggunakan Model Regresi Data Panel. Dua model dasar yang digunakan dalam penelitian ini di mana model ini merupakan model gabungan dari penelitian Simorangkir et al. (2005) dan Soebagyo & Asmanto P.(2007), sehingga model tersebut terbagi menjadi:

#### 1. Model Inflasi:

$$\text{INFLASI}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GPAD}_{it} + \alpha_2 \text{GER}_{it} + \alpha_3 \text{GED}_{it} + \alpha_4 \text{GDPK}_{it} + \alpha_5 \text{GKREDIT}_{it} + \alpha_6 \text{BUNGA}_{it} + \alpha_7 \text{DKRISIS}_{it} + \alpha_8 \text{DOTODA}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1.1)$$

#### 2. Model Pertumbuhan Ekonomi:

$$\text{GPDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{GPAD}_{it} + \beta_2 \text{GER}_{it} + \beta_3 \text{GED}_{it} + \beta_4 \text{GDPK}_{it} + \beta_5 \text{GKREDIT}_{it} + \beta_6 \text{BUNGA}_{it} + \beta_7 \text{DKRISIS}_{it} + \beta_8 \text{DOTODA}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1.2)$$

di mana:

$\text{INFLASI}_{it}$  = Inflasi di daerah *i* pada periode *t* (%).

$\text{GPDRB}_{it}$  = Pertumbuhan PDRB riil daerah *i* pada periode *t* (%).

$\text{GER}_{it}$  = Pertumbuhan Pengeluaran rutin daerah *i* pada periode *t* (%).

$\text{GED}_{it}$  = Pertumbuhan Pengeluaran pembangunan daerah *i* pada periode *t* (%).

$\text{GPAD}_{it}$  = Pertumbuhan Pendapatan asli daerah *i* pada periode *t* (%).

$\text{GDPK}_{it}$  = Pertumbuhan Dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan

umum daerah  $i$  pada periode  $t$  (%).

$GKREDIT_{it}$  = Pertumbuhan Kredit yang disalurkan perbankan umum daerah  $i$  pada periode  $t$  (%).

$BUNGA_{it}$  = Suku Bunga riil di daerah  $i$  pada periode  $t$  (%).

$DKRISIS_{it}$  = *Dummy* krisis, 0 = sebelum krisis ekonomi (1990-1997).  
1 = setelah krisis ekonomi (1998-2007).

$DOTODA_{it}$  = *Dummy* otonomi daerah,  
0 = sebelum otonomi daerah (1990-1998).  
1 = setelah otonomi daerah (1999-2007).

$\alpha_0 = \dots = \alpha_n$  = parameter.

$\beta_0 = \dots = \beta_n$  = parameter.

$e_{it}$  = *Error Term*.

### 1.6.3 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, pada dasarnya ada beberapa pendekatan yaitu dengan menggunakan tiga teknik untuk meregres data panel, yaitu dengan pendekatan *common efek (Common Effect Model)*, pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*) (Widarjono, 2007: 251-262). Dalam periode penelitian ini, teknik yang digunakan untuk meregres data panel adalah melalui pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep.

Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*). Dengan menggunakan metode teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep dan sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Dimasukkannya variabel *dummy* dalam metode ini bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan mengenai model yang sebenarnya.

Model tersebut dianalisis dan diestimasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pertimbangan hasil uji statistik yaitu uji F untuk melihat secara keseluruhan, uji- t untuk melihat secara individu dari masing-masing model tersebut dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Adapun uji yang dilakukan sebagai berikut:

**a. Uji F (secara keseluruhan)**

Uji F ini digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan tertentu.

Hipotesis pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_i = 0$$

di mana:

$\beta_i$  = koefisien regresi ke- i.

Untuk memperoleh nilai F- tabel dapat dilihat dengan tabel F distribution, yaitu dengan menggunakan nilai df numerator dengan rumus  $df = k-1$ , dan df

denominator dengan rumus  $df = n - k$ . Adapun rumus untuk memperoleh F-hitung adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

di mana:

$R^2$  : Koefisien determinasi.

$k$  : Jumlah parameter yang diestimasi, salah satunya merupakan intercept.

$n$  : Jumlah observasi.

Kriteria pengujian uji F sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen.
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  tidak ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Pengujian F-hitung dapat dilihat dari tingkat signifikansi nilai F-hitung (nilai probabilitas) adalah sebagai berikut:

- Jika Probabilitas F-hitung  $> \alpha$ , maka tidak signifikan sehingga  $H_0$  diterima yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara keseluruhan variabel dependennya.
- Jika Probabilitas F-hitung  $< \alpha$ , maka signifikan sehingga  $H_a$  diterima yang artinya variabel independen dapat berpengaruh secara keseluruhan variabel dependennya.

### b. Uji – t (secara individu)

Penelitian ini menggunakan uji – t untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam pengujian ini  $H_0$  yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan tertentu. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan menolak atau menerima hipotesis nol atau  $H_0$  dapat dituliskan sebagai berikut:

Hipotesis Positif:  $H_0 : \beta_i \leq 0$

$H_a : \beta_i > 0$

Hipotesis Negatif  $H_0 : \beta_i \geq 0$

$H_a : \beta_i < 0$

di mana:

$\beta_i$  = Koefisien regresi ke i.

Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003:129)

$$t = \frac{\hat{\beta}}{se(\hat{\beta}_i)}$$

di mana:

t : Nilai hitung.

$\hat{\beta}_i$  : Estimator.

$se(\hat{\beta}_i)$ : Estimated standar error of estimator.



Untuk mencari t-tabel atau nilai kritis t dengan cara melihat tabel t, namun harus menentukan dahulu nilai *degree of freedom* (df), dengan rumus:

$df = n - k$ . Maka pada tingkat signifikansi tertentu dapat dihitung dengan:

Nilai kritis  $t = t_{\alpha, n - k}$  (*one-tail test*).

Secara umum dalam pengambilan keputusan untuk Uji - t adalah sebagai berikut:

- Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak bahwa variabel independen berpengaruh secara terhadap variabel dependen secara individu.
- Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  tidak ditolak bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

Kriteria pengujian juga dapat dibandingkan dengan nilai probabilitas t-hitung dengan alpha tertentu yaitu sebagai berikut:

- Jika Probabilitas t-hitung  $> \alpha$ , maka tidak signifikan sehingga  $H_0$  diterima yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara individu variabel dependennya.
- Jika Probabilitas t-hitung  $< \alpha$ , maka signifikan sehingga  $H_a$  diterima yang artinya variabel independen dapat berpengaruh secara individu variabel dependennya.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  dapat diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

di mana:

TSS : *Total Sum of Squares*

ESS : *Explained Sum of Squares*

RSS : *Residual Sum of Squares*

Menurut Gujarati (2003), pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan yaitu panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Keunggulan yang kedua adalah jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan data panel akan mengurangi masalah *omitted variables* secara substansial. Ketiga, data panel berdasarkan pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel ini cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

#### 1.6.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Inflasi didefinisikan sebagai proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus. Inflasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu dengan Indeks Harga Konsumen dan pendekatan perubahan deflator PDRB. Cara untuk mengukur laju inflasi dalam penelitian ini berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto deflator dari satu tahun ke tahun, di mana PDRB nominal dilihat dari PDRB atas harga berlaku dibagi dengan PDRB riil atas dasar harga konstan 2000 terlebih dahulu kemudian menghitung inflasi dengan PDRB deflator. PDRB Deflator yang digunakan dalam penelitian ini karena PDRB deflator mencerminkan laju inflasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menghitung PDRB deflator adalah sebagai berikut (Nanga, 2005: 28):

$$\text{Deflator} = \frac{\text{PDRB nominal}}{\text{PDRB riil}} \times 100 \%$$

di mana:

- |              |   |
|--------------|---|
| Deflator     | : Produk Domestik Regional Bruto deflator (%).  |
| PDRB nominal | : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (dalam jutaan rupiah).      |
| PDRB riil    | : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 (dalam jutaan rupiah). |

Untuk menghitung laju inflasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi d = \frac{\text{deflator}_t - \text{deflator}_{t-1}}{\text{deflator}_{t-1}} \times 100 \%$$

di mana:

$\pi d$  : Laju Inflasi(dalam %).

Deflator<sub>t</sub> : Produk Domestik Regional Bruto deflator tahun ke t (%).

Deflator<sub>t-1</sub> : Produk Domestik Regional Bruto deflator ke t-1 (%).

## 2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Perubahan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Data yang digunakan berbentuk riil dari tahun 1990-2007 yang diperoleh dari PDRB kab/kota (analisis) (*Badan Pusat Statistik, 2006: 44*). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dinyatakan dalam persen (%), dan cara hitungnya adalah sebagai berikut (Arsyad, 2004: 17):

$$\text{GPDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

di mana:

GPDRB : Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (%).

PDRB<sub>t</sub> : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun ke t  
(dalam jutaan rupiah).

PDRB<sub>t-1</sub> : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun ke t-1  
(dalam milyar rupiah).

3. **Pertumbuhan Pengeluaran Rutin Daerah**

Sebagai perubahan relatif terhadap pengeluaran rutin pemerintah di setiap daerah atau wilayah tertentu dari tahun ke tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat I dan II pada tahun 1990 sampai dengan 2007. Data diperoleh dari DIY dalam angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

4. **Pertumbuhan Pengeluaran Pembangunan Daerah**

Sebagai perubahan relatif terhadap pengeluaran pembangunan yang ditunjukkan oleh pengeluaran daerah otonomi tingkat I dan II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 yang diperoleh dari DIY dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

5. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Didefinisikan sebagai perubahan relatif terhadap pendapatan atau pemasukan daerah pada tahun tertentu, berdasarkan pada realisasi anggaran dan belanja daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di setiap tingkat I dan II dari tahun 1990-2007. Data dalam penelitian ini diperoleh dari DIY dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

6. **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun perbankan umum**

Merupakan perubahan relatif simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka berdasarkan bank umum pada

tahun 1990-2007 yang diperoleh dari SEKDA DIY diterbitkan oleh Bank Indonesia.

7. Pertumbuhan Kredit yang disalurkan perbankan umum

Didefinisikan sebagai perubahan relatif penyediaan uang atau tagihan perbankan dalam rupiah dan valuta asing yang dirinci per tingkat I dan Dati II, menurut jenis valuta, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek yang diperoleh dari SEKDA DIY diterbitkan oleh Bank Indonesia dari tahun 1990-2007.

8. Suku Bunga riil

Didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi per Kabupaten/Kota melalui pendekatan PDRB deflator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku bunga nominal yang digunakan dalam penelitian ini adalah SBI 1 bulan selama periode 1990-2007. Penelitian ini menggunakan SBI 1 bulan karena SBI 1 bulan sebagai alat kontraksi untuk mengatur jumlah uang beredar dan likuiditas di masyarakat.

9. *Dummy* Krisis

Variabel *dummy* dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel yang bersifat kualitatif (Krisis Ekonomi) yang tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa ditandai. Menurut Burhanudin Abdulah (2003), Krisis ekonomi pada tahun 1997 ditandai dengan adanya gejala nilai tukar rupiah yang terdepresiasi pada posisi hingga lebih dari Rp 15.000,00 pada tahun 1997 sehingga mempengaruhi berbagai sektor.

di mana: 0 = sebelum krisis ekonomi (1990-1997).

1 = setelah krisis ekonomi (1998-2007).

10. *Dummy* Otonomi daerah

Variabel *dummy* dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel yang bersifat kualitatif (Otonomi Daerah) yang tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa ditandai semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1999.

di mana: 0 = sebelum otonomi daerah (1990-1998).

1 = setelah otonomi daerah (1999-2007).

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Teori

Studi empiris dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan pendekatan kurva IS-LM dan kurva AD-AS tertuang dalam bab II.

### **BAB III Perkembangan Perekonomian DIY**

Bab III menjelaskan mengenai kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, pendapatan asli daerah, dana pihak ketiga, kredit, maupun suku bunga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB IV Analisis Data**

Pada bab IV menjelaskan tentang analisis data dan hasil perhitungan estimasi dari data yang telah diolah berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan.

### **BAB V Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta implikasinya dalam perekonomian.